

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN**  
**INDUSTRI (*BANTAENG INDUSTRIAL PARK*) DI KABUPATEN**  
**BANTAENG**



Disusun oleh:

NADIA

Nomor Stambuk : 105611123517

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
INDUSTRI (*BANTAENG INDUSTRIAL PARK*) DI KABUPATEN  
BANTAENG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan diajukan oleh:

NADIA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611123517

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR**

Judul Proposal : Implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Nadia

Nomor Induk Mahasiswa : 105611123517

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**

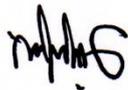


**Dr. Abdi, M.Pd**

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730 727



**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**  
NBM: 991 742

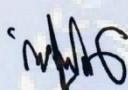
## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Tela diterima oleh penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0297/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari jum'at tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730 727

  
Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM: 992 797

### PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

(



)

2. Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si

(



)

3. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

(



)

4. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP

(



)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadia

Nomor Induk Mahasiswa : 105611123517

Program Studi : Ilmu Administasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Nadia

## ABSTRAK

**NADIA, 2024. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng** (di bimbing oleh Muhlis Madani dan Abdi)

Penelitian ini bertujuan untuk yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri (*Bantaengt Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif adapun jumlah informan sebanyak 4 orang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari: reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng menerapkan kebijakan kawasan industri (*Bantaeng Industrial Park*). Adapun bentuk implementasi yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banteang yaitu membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu kabupaten yang maju di Sulawesi Selatan Pembangunan Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).

Adapun proses dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Industri adalah sebagai berikut: 1.Komunikasi bertujuan untuk menciptakan kesepahaman dan penyampaian pesan dan juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik, individual, dalam kelompok ataupun organisasi. 2.Sumber daya bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. 3.Sikap bertujuan untuk mekanisme dalam pertahanan ego dalam rangka melindungi dalam tantangan internal maupun eksternal. Sikap ini diambil bila orang yang bersangkutan dalam keadaan terancam baik dirinya maupun egonya. Untuk mempertahankan egonya orang tersebut akan mengambil sikap tertentu.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Kawasan Industri**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri (Bantaeng Industrial Park) di Kabupaten Bantaeng”*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk bisa menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Orang tua saya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Ayahanda Supriadi dan Ibunda Muriana yang telah berkorban tanpa pamrih dan yang tidak bosan-bosannya mendorong saya untuk bisa berada di tahap ini. Terima kasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan.

5. Kakak Sukardi dan adik Nindi. Terima kasih untuk setiap dukungan yang telah kalian berikan untuk saya dapat mengerjakan skripsi ini.
6. Untuk Riswanda, terima kasih telah kebersamai saya selama masa perkuliahan ini, terima kasih atas support yang senantiasa diberikan.
7. Untuk teman seperantauanku, Mei dan Darma. Terima kasih telah menjadi teman, sahabat dan sekaligus saudara selama kuliah di Makassar, terima kasih atas dukungannya serta selalu mendorong untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak Dinas Perindustrian Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
9. Pihak PT. Huadi Nikel yang telah memberikan izin penelitian.
10. Pihak Dinas PTSP yang telah membantu dan memberi izin untuk melakukan penelitian.
11. Terima kasih kepada teman-teman ADN (F) 2017 yang telah kebersamai semasa perkuliahan.

Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati dari kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Sebagai manusia yang mempunyai kekurangan, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan walaupun telah menerimabantuan dari beberapa pihak, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Maka dari itu, demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi

manfaat dan dapat pula memberikan sumbangan bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Nadia



## DAFTAR ISI

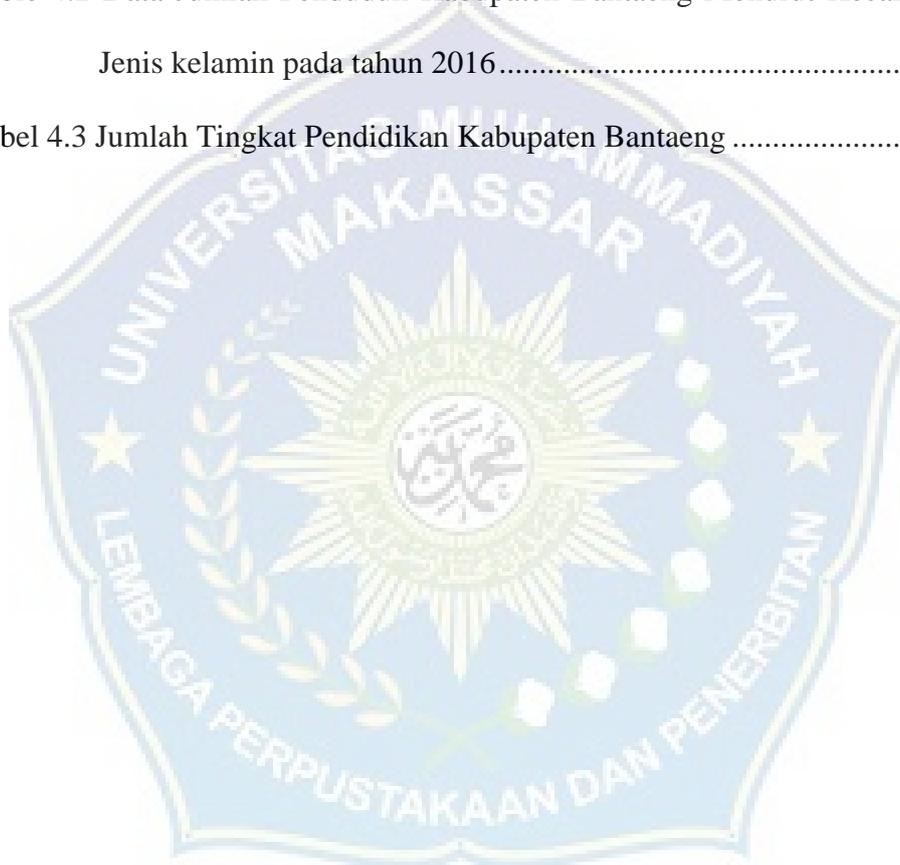
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	7
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Konsep Kebijakan Publik .....	9
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	9
2. Siklus Kebijakan Publik .....	13
3. Ciri-ciri Kebijakan Publik .....	18
C. Konsep Implementasi Kebijakan .....	19
1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	19
2. Model Implementasi Kebijakan .....	23
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	26
D. Konsep Kawasan Industri.....	29
1. Pengertian Kawasan Industri.....	29
2. Jenis-jenis Kawasan Industri .....	32
3. Manfaat Kawasan Industri.....	32
E. Faktor Lokasi Industri dan Syarat-syaratnya Berdasarkan Orientasi Lokasi Bahan Baku, Tenaga Kerja, Pasar, dan Biaya Angkutan .....	34
1. Faktor Lokasi Industri.....	34
2. Syarat-syarat Berdirinya Industri .....	34
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Berdirinya Industri.....	34
F. Kerangka Pikir .....	35
G. Fokus Penelitian .....	36
H. Deskripsi Fokus Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39

A. Waktu dan Lokasi .....	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Informan Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Teknik Pengabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Hasil Penelitian.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini. ....	7
Tabel 2.2. Tahap Analisis Kebijakan .....	17
Tabel 4.1 Nama sungai, Panjang sungai dan kecamatan yang dilintasi.....	48
Table 4.2 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng Menurut Kecamatan dan Jenis kelamin pada tahun 2016.....	49
Tabel 4.3 Jumlah Tingkat Pendidikan Kabupaten Bantaeng .....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Kebijakan Publik.....	14
Gambar 2.2. Proses kebijakan publik.....	16
Gambar 2.3. Bagan Kerangka Pikir .....	36
Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	53



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Arah pembangunan industri di Indonesia sudah dituangkan pertimbangan yang diharapkan kelak mampu membawa perubahan mendasar dalam struktur perekonomian nasional yang semakin kokoh dan seimbang. Diharapkan dengan adanya pembangunan industri akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan industri disuatu daerah tentunya akan memberikan dampak bukan hanya pada ekonomi dan sosial tetapi akan mempengaruhi juga budaya masyarakat sekitar. Pembangunan industri merupakan bagian pada usaha jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian yang sedang tidak seimbang saat ini, dikarenakan terlalu bercorak pertanian yang seharusnya antara pertanian dan industri haruslah seimbang untuk menunjang perekonomian menuju kearah yang lebih kokoh dan seimbang. Pembangunan kawasan industri ini bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, memanfaatkan sumber daya alam serta energi dan menunjang pembangunan daerah dan sumber daya manusia.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035” (Pusat komunikasi publik kementerian perindustrian, 2015:20) menjelaskan bahwa arah pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam pada industri hulu berbasis argo, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara efektif melalui penyiapan sumber daya

manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi dan juga untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dalam berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Data memperlihatkan, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata sekitar 28 persen pada periode 2000-2006 dimana hampir sebagian besar merupakan industri non migas. Signifikannya kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkatkan urgensi sektor ini untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sektor industri dicirikan dengan kemampuannya dalam menyerap lapangan kerja ditambah lagi dengan adanya keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor lainnya. Satu hal yang esensial adalah proses pengembangan aktivitas industri akan memberikan dampak pada sektor lainnya serta perekonomian secara keseluruhan atau yang dikenal sebagai dampak pengganda (*multipiler effect*) (Silalahi, 2009:3).

Pengembangan kawasan industri Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri, dimana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, wajib masuk dalam kawasan industri. Dasar pertimbangan mewajibkan industri baru masuk dalam

kawasan industri agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, akrab lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur yang diperlukan (Hatta, 2018:1).

Salahsatu acuan normatif yang telah disusun untuk menunjang pengembangan kegiatan pemerintah daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah sebagai dampak dari desentralisasi pemerintahan yang diperkuat dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah telah memberikan ruang cukup luas bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan atas otonomi sebagaimana yang telah diatur dalam perundang undangan.

Otonomi daerah yang telah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur berbagai macam kepentingan masyarakat, sehingga suatu daerah harus bisa memanfaatkan kewenangan tersebut sebagai salah satu peluang untuk memperoleh pendapatan asli daerah demi memajukan masyarakat di daerah tersebut. Sektor perindustrian merupakan suatu sektor pembangunan daerah yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian baik sebagai sumber devisa atau pendapatan. Atas dasar itulah sehingga Pemerintah Kabupaten Bantaeng kemudian merencanakan pengadaan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Acuan pengadaan

Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yaitu Perda No. 02 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Bantaeng. Pada pasal 39 ayat 2 dalam Perda tersebut menyebutkan “kawasan industri besar ditetapkan di kawasan Bantaeng di Kecamatan Pa’jukukkang”.

Kabupaten bantaeng menjadi salah satu kabupaten yang maju di Sulawesi Selatan. Pembangunan Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) menjadi industri strategis di Bantaeng yang cukup menjajjikan dalam memberikan efek secara ekonomi bagi Bantaeng. Disisi lain, pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng yang berbasis *Bantaeng Industrial Park* (BIP) masih terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu masih lemahnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengangkutan impor hasil industri di Kabupaten Bantaeng serta masih minimnya masyarakat lokal yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dalam kerjasama pengolahan hasil industri yang ada meskipun banyak perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam pengolahan industri ini, yang seharusnya adanya *Bantaeng Industrial Park* (BIP) ini dapat bermanfaat sebagai sumber pendapatan daerah penyedia lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan industri di Kabupaten Bantaeng. Sehingga,

peneliti mengambil judul “**Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, sehingga masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng dengan indikator:

- 1) Bagaimana komunikasi yang ada di dinas tenaga kerja dan perindustrian ?
- 2) Apa sumber daya sudah berjalan dengan baik ?
- 3) Bagaimana sikap pemerintah kabupaten bantaeng dengan adanya Kawasan industri ?
- 4) Bagaimana struktur birokrasi dinas tenaga kerja dan perindustrian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng dengan indikator:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi di dinas tenaga kerja dan perindustrian
- 2) Untuk mengetahui sumber daya yang ada di kabupaten bantaeng
- 3) Untuk mengetahui sikap pemerintah dinas tenaga kerja dan perindustrian
- 4) Untuk mengetahui struktur birokrasi di Kawasan industry

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan informasi, kajian dan acuan sekaligus evaluasi terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan adanya program *Bantaeng Industrial Park* di Kabupaten Bantaeng.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri khususnya *Bantaeng Industrial Park* (BIP) di Kabupaten Bantaeng.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini.

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Teori yang digunakan	Metode	Hasil
1.	Hatta, 2018: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mintzberg, Lampel, Quinn tentang dimensi strategi dalam buku <i>The Strategy process</i> yaitu: tujuan, kebijakan, dan program.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdam dan Tailor (2001) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.	Dimensi-dimensi strategi yaitu tujuan, kebijakan, dan program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng termasuk kedalam strategi sebagai rencana, karena kita dapat melihat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang mencoba untuk menetapkan arah organisasi menjadi lebih baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang.

2.	Alfa Reza Triananda, 2022: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Dalam Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri atas empat dimensi yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Batang telah berjalan dengan baik, akan tetapi belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
3.	Justiar Noer, Dkk. 2019: Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Marile S. Grindle, bahwa dalam keberhasilan sebuah proses implementasi program ataupun kebijakan terdapat dua variabel yaitu <i>content of policy</i> (isi kebijakan) dan <i>context of</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Creswell, 2013; Moleong, 2007). Metode kualitatif memberikan gambaran dari hasil penelitian nantinya dalam pengembangan konsep teori penelitian yang digunakan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum optimal. Faktor-faktor penghambat

		<i>implementation</i> (lingkungan implementasi).		dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.
--	--	---	--	--

Sumber: Darmayanti, 2021:7

## B. Konsep Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Taufiqurrokhman, 2014:3)

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan

kebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Thomas R. Dye yang dikutip Said Zainal Abidin dalam Febi Dwi Andyani mengatakan (*whatever governments choose to do or not to do*), yang artinya bahwa kebijakan adalah sebuah pilihan bagi pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal (Febi Dwi Andyani 2020:14)

Menurut Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan adanya tujuan, nilai dan poraktik (Zainal Abidin dalam Febi Dwi andyani 2020:15). Pengertian serupa mengenai kebijakan publik diungkapkan oleh James E. Anderson dalam Febi Dwi andyani, 2020:15 bahwa kebijakan sebagai arah suatu tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau permasalahan. Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang undang (S Nugraha dalam Mala antika 2017:32).

Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan (Wayne Parsons dalam Lina Wati 2013:13).

Kebijakan memiliki beberapa implikasi yaitu:

- a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan;
- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri;
- c. Kebijakan ialah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan;
- d. Kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif (Budi winarno dalam Lina Wati, 2013:13).

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*. Dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah politik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan yang merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang ditetapkan, yang bertujuan dalam melindungi serta membatasi perilaku di dalam masyarakat. Karena para pembuat kebijakan perlu mencari tahu dan meninjau terlebih dahulu terkait isu-isu masalah apa yang terjadi dimasyarakat. Masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral (Idos Firdaus, 2019:15).

Menurut Inu Kencana dalam Idos Firdaus (2019:16) dalam bukunya pengantar ilmu pemerintahan, bahwa *public policy* dapat menciptakan situasi

dan dapat pula diciptakan situasi. Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern yakni sebagai label untuk sebuah bidang aktifitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori atau model dan juga sebagai proses (Wayne Parsonss dalam Idos Firdaus, 2019:16).

Pakar inggris, W.I. Jenkins dalam Solichin Abdul Wahab (2021:15) merumuskan kebijakan publik *“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the mans of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Sebuah kebijakan publik membutuhkan implementasi agar kebijakan publik tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi publik karena menyangkut dengan kepentingan publik secara keseluruhan. Dalam tatanan itu Jones berpendapat bahwa *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”*. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dan dalam kaitan itu

terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu organization, interpretation, dan application (Alexander Phuk Tjilen, 2019:14)

## **2. Siklus Kebijakan Publik**

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya (Nuryanti Mustari, 2015:49)

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni:

- a) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elit politik bukan dianggap sebagai masalah;
- b) Membuat batasan masalah;
- c) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan politik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita didalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom dalam Nuryanti Mustari, 2015:52). Namun demikian, beberapa ahli membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap atau siklus kebijakan publik adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Siklus Kebijakan Publik

a) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama

halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

b) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan, yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan.

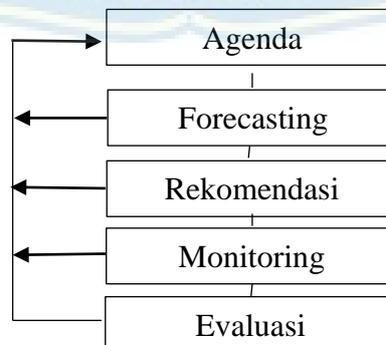
c) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

d) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan (Nuryanti Mustari, 2015:53-55).

William N. Dunn dalam Taufiqurrahman (2014:16), juga menjelaskan bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.



Gambar 2.2. Proses kebijakan publik

Berikut merupakan tahapan analisis kebijakan menurut William N. Dunn dalam Taufiqurrahman(2014:17):

Tabel 2.2. Tahap Analisis Kebijakan

<b>Tahap</b>	<b>Karakteristik</b>
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
Forecasting (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
Evaluasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Berdasarkan penjelasan tentang siklus kebijakan publik diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik harus melibatkan banyak proses dan harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang

telah ditentukan oleh ahli politik sehingga kebijakan publik yang telah disusun dapat diimplementasikan dan terlaksana dengan baik serta tercapainya tujuan yang diharapkan.

### 3. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin dalam Dinda Asmaradhana Ama (2021:18) mendefinisikan ciri-ciri kebijakan publik yaitu:

- a) Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
- b) Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c) Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk pemerintah.
- d) Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

Menurut Suharno dalam Dhea Candra Dewi (2022:27), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- b) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk

tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan (Dhea Candra Dewi Dkk, 2022:27)

## C. Konsep Implementasi Kebijakan

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil (Webster’s Dictionary dalam Rahmi B, 2018:19).

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam

praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Rahmi B, 2018:19).

Menurut Patton dan Sawicki dalam Aditya Eko Putra (2018:11), bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Sinta Noviana Mattata (2015:141), implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Meter dan Hom dalam sinta Noviana Mattata (2015:142), mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a) Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
- b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia,
- c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementator sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program,
- d) Karakteristik agen pelaksanaan yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program,
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan,

- f) Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle dalam Haedar Akib (2010:2) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995:461) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

T.B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood dalam Haedar Akib, 2010:3). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.

## 2. Model Implementasi Kebijakan

Ere Mardella Arbiani, Dkk (2019:107), ada sepuluh model dalam studi implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Model Van Meter dan Van Horn, model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.
- b) Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*).
- c) Model Hogwood dan Gunn. Model ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu.
- d) Model Goggin, Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai "*communication model*" untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai "generasi ketiga model implementasi kebijakan" (1990). Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi

kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

- e) Model Grindle. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi oleh *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasinya).
- f) Model Elmore, Dkk. Model yang disusun Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjren dan David O'porter (1981). Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki.
- g) Model Edward, menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation the decision of polici makers will not be carried out succesfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition, or attitudes*, dan *beureurcratis structures*.

- h) Model Nakamaru dan Smallwod, menggambarkan proses implementasi kebijakan secara detail. Begitu detailnya, sehingga model ini relatif relevan diimplementasikan pada semua kebijakan.
- i) Model Jaringan. Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen. Interaksi diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting didalamnya.
- j) Model Matland, Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik diantaranya menurut Edward III terdapat empat faktor yaitu: a) komunikasi (*communication*), b) sumber daya (*resources*), c) disposisi (*Disposition*), yaitu kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implentor*) untuk melaksanakan kebijakan dan d) struktur birokratis (*bureauratic structure*) (Joko Widodo, h dalam Dikson Silitonga, 2022:53).

#### a) Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk pada tipe komunikasi vertikal.

#### b) Sumber Daya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup jumlah staf yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dengan fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

c) Sikap (disposisi)

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Metter and Horn disposisi yang diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Menurutnya ada tiga hal yang terdapat didalam disposisi atau sikap pelaksana yang merupakan unsur penting dalam implementasi yaitu:

- 1) Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan
  - 2) Arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksana implementasi kebijakan (penerimaan dan penolakan)
  - 3) Intensitas dan respon.
- d) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif karena tidak efisien struktur birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan.

- 1) Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP).

- 2) Pengaruh struktur birokrasi bagi implementasi SOP adalah menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi.

Pendapat hampir sama dikemukakan oleh Nugroho, ia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu: 1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar komunikasi, 2) karakteristik dari agen pelaksana, 3) kondisi ekonomi, sosial dan politik, 4) kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementator. Lebih lanjut Nugroho menyatakan bahwa disamping keempat faktor tersebut terdapat pula faktor-faktor diluar kebijakan publik yang berpengaruh terhadap implementasi, yakni (1) indikator kondisi sosio-ekonomi-teknologi, (2) dukungan publik, (3) sikap dan sumber daya dari konstituen, (4) dukungan pejabat yang lebih tinggi, (5) komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana (Riant Nugroho dalam Dikson Silitonga, 2022:53).

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Greston, yang menetapkan empat faktor, yaitu: 1) *Translation ability*, yaitu kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang diputuskan oleh pengambil keputusan yang dilaksanakan, 2) *resources* (sumber daya), khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, finansial, dan peralatan/saran, 3) *limited number of players*, yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang tidak sehat, dan 4) *accountability*, yaitu adanya proses

pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan (Gerston, cit. h dalam Dikson Silitonga, 2022:54).

## **D. Konsep Kawasan Industri**

### **1. Pengertian Kawasan Industri**

Pengertian kawasan industri Hasibuan dalam E N Homer, Dkk (2016:17), industri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Wignjosoebroto mengartikan industri sebagai suatu lokasi/tempat dimana aktivitas produksi akan diselenggarakan, sedangkan aktivitas produksi bisa dinyatakan sebagai sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk mengubah satu kumpulan masukan (*human resources, materials, energi, information, dll*) menjadi produk keluaran (*finished product* atau *services*) yang memiliki nilai tambah.

Di Indonesia pengertian kawasan industri mengacu kepada keputusan Presiden (Kepres) Nomor 41 Tahun 1996. Menurut kepres tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemutusan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri.

Yang dimaksud kawasan dengan industri adalah kawasan tempat pemutusan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan

Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Luas lahan kawasan industri paling rendah 50 hektar dalam satu hamparan.

Industri yang akan menjalankan industri setelah Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri mulai berlaku, wajib berlokasi kawasan industri. Kewajiban berlokasi di kawasan industri dikecualikan bagi:

- a) Perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
- b) Industri mikro, kecil dan menengah.

Perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis (Dedy Oetama dan Intan Permatahati, 2021:21)

Kawasan industri memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan secara bersama agar dapat meningkatkan produktivitas. Fasilitas yang dapat diakses, antara lain: jaringan transportasi, jaringan energi & listrik, jaringan komunikasi, ketersediaan air, dan sanitasi. Fasilitas penunjang dalam industri, antara lain: tempat pembuangan sampah, pendidikan, perumahan, kesehatan, pemadam kebakaran, kantin, kantor polisi, bank, kantor pos, dan *show room*. Sedangkan fasilitas dasar yang wajib tersedia adalah pengolahan air baku & air limbah, drainase, penerangan dan jalan.

Keberadaan kawasan industri memberikan dampak positif berupa kelestarian lingkungan terjaga, masyarakat memperoleh pekerjaan, lokasi pendirian & pertumbuhan industri yang sesuai, penggunaan lahan secara optimal, menambah pendapatan asli daerah, memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan industri dan memperlancar aktivitas produksi. Secara rinci kawasan industri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 142/2015 tentang Kawasan Industri (Mochammad Fattah, Pudji Purwanti, 2017:12)

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya., dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Sedangkan pengertian jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/ dengan balas jasa tertentu (Nidya Waras Sayekti, Dkk, 2022:5).

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk: a) mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; b) meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; c) meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri; dan d) memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang (Nidya Waras Sayekti, Dkk, 2022:6).

## **2. Jenis-jenis Kawasan Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja**

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, yang terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta memiliki seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan industri pengolahan menurut Badan Pusat Statistik dibagi dalam 4 golongan yaitu:

- a) Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
- b) Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
- c) Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
- d) Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu (Nidya Waras Sayekti, Dkk, 2022:7)

### 3. Manfaat Kawasan Industri

Eliezer Nelson Homer, Dkk dalam Nidya Waras Sayekti, Dkk, (2022:7), Manfaat kawasan industri yang berbasis pada komunitas publik memiliki manfaat baik bagi industri itu sendiri maupun bagi perekonomian di wilayahnya. Bagi industri, kawasan membawa keuntungan sebagai berikut:

- a) Lokalisasi ekonomi. Melalui kawasan, dengan memanfaatkan kedekatan lokasi, industri yang menggunakan *input* (informasi, teknologi atau layanan jasa) yang sama dapat menekan biaya peroleh dalam penggunaan jasa tersebut. Misalnya, pendirian pusat pelatihan di kawasan akan memudahkan akses industri pelaku kawasan tersebut.
- b) Pemusatan tenaga kerja. Kawasan akan menarik tenaga kerja dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan, sehingga memudahkan industri pelaku untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dan mengurangi biaya pencairan tenaga kerja.
- c) Akses pada pertukaran informasi dan patokan kinerja. Industri yang tergabung dalam klaster dapat dengan mudah memonitor dan bertukar informasi mengenai kinerja *supplier* dan nasabah potensial. Dorongan untuk inovasi dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan perbaikan produk.
- d) Produk Komplemen. Karena kedekatan lokasi, produk dari satu pelaku industri dapat memiliki dampak penting bagi aktivitas usaha industri

yang lain. Disamping itu, kegiatan usaha yang saling melengkapi ini dapat berintegrasi dalam pemasaran bersama.

## **E. Faktor Lokasi Industri dan Syarat-Syaratnya Berdasarkan Orientasi Lokasi Bahan Baku, Tenaga Kerja, Pasar, dan Biaya Angkutan**

### **1. Faktor Lokasi Industri**

Faktor-faktor untuk menentukan lokasi suatu industri sebagai berikut:

- a) Karena sifatnya, dalam membangun suatu industri, ada yang berorientasi pada lokasi bahan baku.
- b) Industri yang lokasinya berorientasi pada tenaga kerja. Industri semacam ini biasanya bersifat padat karya.
- c) Industri yang lokasinya berorientasi pada daerah pemasaran.
- d) Industri yang lokasinya berorientasi pada biaya angkutan.

### **2. Syarat-syarat Berdirinya Suatu Industri**

- a) Tersedia bahan mentah atau bahan baku yang cukup.
- b) Tersedia tenaga kerja baik tenaga ahli maupun tenaga di bidang produksi.
- c) Tersedia pasar (konsumen) baik didalam negeri maupun di luar negeri.
- d) Tersedianya modal usaha.
- e) Tersedianya jaringan lalu lintas dan komunikasi yang memadai.
- f) Stabilitas politik yang mantap.

g) Adanya kemauan kerja keras bagi penduduknya.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Industri**

a) Faktor pendukung pembangunan industri. Beberapa faktor yang menjadi pendukung pembangunan industri di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Indonesia kaya bahan mentah.
- 2) Letak geografis Indonesia yang menguntungkan.
- 3) Tersedia pasar di dalam negeri yang banyak.
- 4) Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak.
- 5) Tersedia berbagai sarana maupun prasarana untuk industri.
- 6) Tersedia sumber tenaga listrik yang cukup.
- 7) Iklim usaha yang menguntungkan untuk orientasi kegiatan industri.
- 8) Banyak melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal permodalan, alih teknologi, dan lain-lain.
- 9) Kebijakan pemerintah yang menguntungkan.

b) Faktor penghambat pembangunan industri di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penguasaan teknologi yang masih kurang.
- 2) Modal yang dimiliki masih relatif kecil.
- 3) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum tersedia merata di seluruh Indonesia.
- 4) Mutu barang yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan negara-negara lain.

- 5) Promosi di pasar internasional masih sangat sedikit dilakukan.
- 6) Jenis-jenis barang tertentu bahan bakunya masih sangat tergantung dari negara lain.

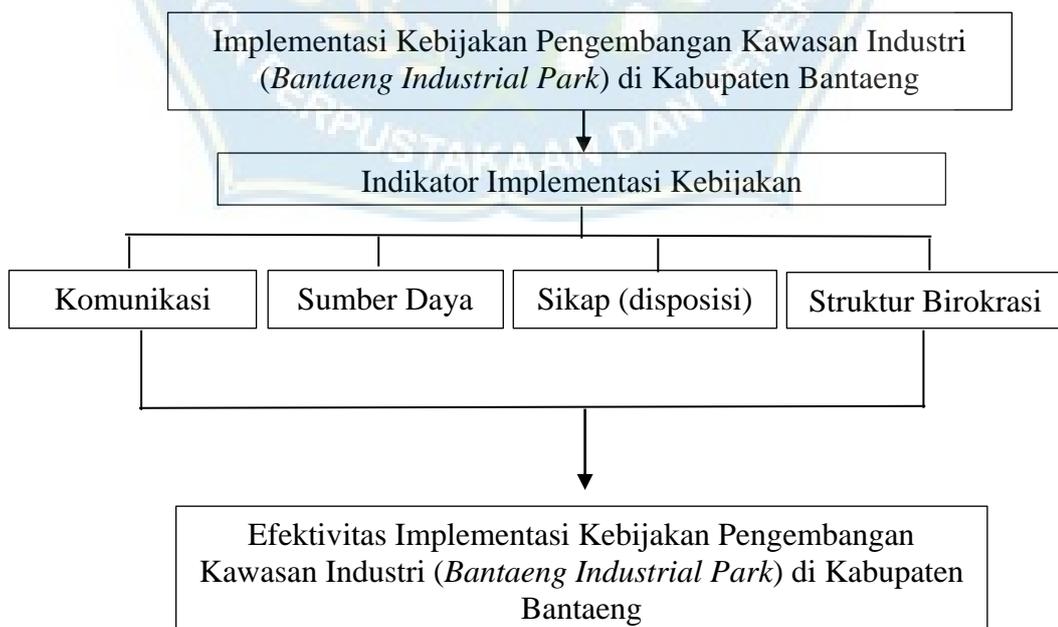
(The King Eduka, 2018:30).

## F. Kerangka Pikir

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting, yang dimana tahap ini nantinya akan menentukan apakah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah telah benar benar dijalankan sehingga dapat memberi dampak, manfaat, serta harapan perubahan dari kegiatan atau pelayanan dari suatu program dalam hal ini Pengembangan Kawasan Industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka pikir yang akan menjadi acuan penelitian ini adalah:

Gambar 2.3. Bagan Kerangka Pikir



## **G. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada kerangka pikir, maka fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan dan dikaji berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: untuk mengetahui implementasi pengembangan kawasan industri perindustrian di Kabupaten Bantaeng.

## **H. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk pada tipe komunikasi vertikal. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan di pahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu di komunikasikan secara tepat para pelaksana.
2. Sumber daya, merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup jumlah staf yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau

kewenangan dengan fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Sikap (disposisi). Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Metter and Horn disposisi yang diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Menurutnya ada tiga hal yang terdapat didalam disposisi atau sikap pelaksana yang merupakan unsur penting dalam implementasi yaitu:
  - a) Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan
  - b) Arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksana implementasi kebijakan (penerimaan dan penolakan)
  - c) Intensitas dan respon.

Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan atau program.

4. Struktur Birokrasi meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif karena tidak efisien struktur birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan.

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus di lakukan, inplentasi masi gagal

apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi kordinasi yang perlu dalam melaksanakan kebijakan.

- a) Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)*.
- b) Pengaruh struktur birokrasi bagi implementasi SOP adalah menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal 17 juli 2023 sampai tanggal 17 september 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bantaeng.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian ini adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang akan diamati. Tujuan utama menggunakan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Mubarak, dalam Darmayanti, 2021:23). Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah penelitian yang menjelaskan atau mengungkap fenomena yang terjadi yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu dimana peneliti berangkat kelapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian (Supriadi, 2018:33).

Menurut Muri Yusuf (dalam Darmayanti,2021:24) dalam konteks penelitian kualitatif, fenomena merupakan sesuatu yang hadir dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, sesuatu menjadi tampak dan nyata. Peneliti mendeskripsikan sesuatu seperti penampilan fenomena, seperti barangnya sendiri tanpa mengandalkan praduga-praduga konseptual. Penelitian Fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa, dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Sedangkan Bogdan dan Biklen (dalam Darmayanti, 2021:24) mengemukakan bahwa fenomenologi merupakan suatu tipe/jenis penelitian kualitatif yang berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang lain dalam situasi tertentu.

### **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan segala hal yang mampu memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang dibuat oleh seorang peneliti dengan maksud khusus menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dirangkum sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau tempat dilakukannya penelitian.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Sapriadi dalam Darmayanti 2021:24) Pemilihan informan penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, dengan harapan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya terkait Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri (*Bantaeng Industri Park*). Informan ditentukan melalui teknik *snowball sampling*, yaitu proses ditentukannya informan berdasarkan informan yang sebelumnya tanpa harus menentukan jumlahnya secara pasti dengan mencari secara akurat terkait topik penelitian yang dibutuhkan. Pencarian informan akan selesai setelah informasi yang didapatkan dalam penelitian dianggap telah memadai dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka informan dalam peneliian ini berjumlah 4 orang, yaitu :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng  
Sebanyak 1 Orang
2. Pengelola Kawasan Industri sebanyak 1 orang
3. Masyarakat sebanyak 2 orang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi Menurut Sutrisno (dalam Darmayanti, 2021:25) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng.
- 2) Wawancara Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang di wawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara juga diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik Tanya jawab yang pada akhirnya akan menghasilkan konstruksi makna tentang topik tersebut (Helaluddin Hengki Wijaya dalam Darmayanti, 2021:27). Wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri (*Bantaeng Industrial Park*) di Kabupaten Bantaeng.
- 3) Studi Dokumentasi Menurut (Mardawani dalam Darmayanti 2021:26) studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif

dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek penelitian. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Agar hasil penelitian dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman. Kegiatan pokok analisis model ini meliputi: reduksi data, display data (penyajian data), dan penyimpulan. Adapun rincian model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data Reduksi data yaitu proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan dengan cara sedemikian sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian, penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kuantitatif yang valid.
3. Kesimpulan Data data yang telah direduksi, disajikan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan bagian

dari konfigurasi utuh, sehingga kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang benar tidaknya laporan hasil penelitian, sehingga kesimpulan dapat diuji kebenarannya.

### G. Teknik Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini, ada sejumlah cara yang ditempuh untuk memperoleh tingkat kepercayaan atau untuk menguji keabsahan data, yakni meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. *Credibility* (validitas internal) Validitas internal atau kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian (Satori & Komariah dalam Darmayanti, 2021:27). Dengan demikian, validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai (Sugiono dalam Darmayanti, 2021:28).
2. *transferability* (Validasi Eksternal) Transferabilitas atau validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiono dalam Darmayanti, 2021:28).
3. *Dependability* (Reliabilitas) Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiono dalam Darmayanti, 2021:28). Dalam hal ini yang dilihat adalah keseluruhan proses penelitian, dimana data yang ada haruslah merupakan data yang benar benar

didapatkan dari hasil penelusuran kelapangan. Jika peneliti tak mempunyai atau tak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya” maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan (Faisal; Sugiono dalam Julia, 2018:55). Dengan kata lain, reliabilitas mengandung unsur kejujuran dan tanggung jawab peneliti terhadap hasil penelitian yang diperolehnya. Maka dari itu, suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya (Satori & Komariah dalam Julia, 2018:55).

4. Konfirmabilitas (Objektivitas) Objektivitas berkenaan dengan “derajat Kesepakatan” atau “Interpersonal agreement” antarbanyak orang terhadap suatu data (Sugiono dalam Julia, 2018:55). Uji Konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas (Satori & Komariah dalam Julia, 2018:55).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah kabupaten yang dikenal dengan sebutan Butta Toa, terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng ini mempunyai luas wilayah 395,8 km<sup>2</sup> terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, 67 desa dan kelurahan, 502 rukun warga (RW) dan 1.108 rukun tetangga (RT).

Kedelapan kecamatan tersebut adalah kecamatan Bisappu, kecamatan Pajjukukang, kecamatan Bantaeng, kecamatan Eremerasa, kecamatan Gantarang Keke dan kecamatan Sinoa. Kecamatan Tompobulu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 76,99 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 28,85 km<sup>2</sup>.

##### a. Keadaan Fisik/Geografis Kabupaten Bantaeng

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak ± 120 km arah selatan Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" bujur timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 M sampai 1.000 M diatas

permukaan laut. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian Selatan Provinsi Selatan yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
3. Sebelah Selatan : Laut Flores
4. Sebelat Barat : Kabupaten Jeneponto

#### **b. Keadaan Topografi Kabupaten Bantaeng**

Curah hujan di kabupaten Bantaeng hampir merata di setiap bulan dalam setahun, jumlah hari hujan berdasarkan data tahun 2015 mencapai rata-rata 4,42 hari perbulan dengan jumlah hari hujan, dalam setahun sebanyak 53 hari dalam setahun, sedangkan curah hujan dalam setahun mencapai sebesar 169,33mm.

Sebagai daerah dengan luas yang relative rebatas atau hanya kurang lebih 0,8 daei luas provinsi Sulawesi Selatan, maka kabupaten Bantaeng hanya memiliki 11 sungai yang melintas beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Adapun sungai-sungai yang di maksud antara lain:

Tabel 4.1 Nama sungai, Panjang sungai dan kecamatan yang dilintasi.

No	Nama Sungai	Panjang	Kecamatan Dilintasi
1.	Pamosa	1,7	Pajukukang
2.	Turun Asu	7,4	Tompobulu, Gantang Keke
3.	Balang Sikuyu	10,8	Uluwere, Sinoa, Bissappu
4.	Panaikang	11,7	Uluwere, Sinoa, Bissappu
5.	Kalamassang	14,2	Tompobulu, Gantang Keke
6.	Lemoa	14,4	Uluwere, Bissappu
7.	kaloling	17,1	Tompobulu, Gantang Keke
8.	Biangkeke	20,4	Tompobulu, Gantang Keke
9	Calendu	20,7	Uluwere, Bantaeng
10.	Biyalo	43,3	Uluwere, Tompo Bulu
11	Nipa-nipa	25,1	Tompobulu, Gantang Keke

*Sumber: Masterplan Kawasan Industri Nikel di Bantang.*

Dari beberpa aliran sungai diatas, sungai tepanjang adalah sungai Biyalo dengan Panjang 43,3 yang berlokasi di kecamatan Uluwere, Tompo Bulu.

### c. Kondisi Demografis

Kondisi Demografis Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

#### 1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng menurut sumber data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bantaeng tahun 2016 adalah sebanyak 182.283 jiwa.

Table 4.2 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin pada tahun 2016.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bissappu	15.691	16.619	32.310
2.	Uluere	5.592	5.723	11.315
3.	Sinoa	5.900	6.232	12.132
4.	Bantaeng	18.539	19.450	37.989
5.	Eremerasa	8.734	9.728	18.462
6.	Tompobulu	10.801	12.102	22.903
7.	Pajukukang	14.725	15.324	30.049
8.	Gantarangkek	8.030	9.093	17.0123
	Jumlah	88.012	94.271	182.283

*Sumber Data: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bantaeng tahun 2016.*

Dari tabel jumlah penduduk diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bantaeng dengan jumlah 37.989 jiwa. Kemudian kecamatan yang penduduk

paling sedikit berada di kecamatan Uluere dengan jumlah 11.315 jiwa.

## 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas Pendidikan di suatu daerah. Berikut ini merupakan data tingkat pendidikan di Kabupaten Bantaeng.

Tabel 4.3 Jumlah Tingkat Pendidikan Kabupaten Bantaeng

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Tidak/Belum Sekolah	64.822	-
2.	Belum Tamat SD	28.249	-
3.	SD	16.331	-
4.	SMP/Sederajat	16.331	-
5.	SMA/Sederajat	20.403	-
6.	Diploma	2.911	-
7.	S-I	4.710	-
8.	S-II	202	-
9.	S-III	14	-

*Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catat Sipil 2013.*

Berdasarkan data tingkat Pendidikan diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat Pendidikan Tidak/Belum sekolah sebanyak 64.822 jiwa.

## **2 . Profil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng**

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terletak di pusat kota Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415, Indonesia. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di pimpin oleh kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dan tenaga kerja berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian meliputi pendalaman dan pemuatan struktur industri, peningkatan daya asing, pengembangan iklim usaha industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industry strategis dan industry hijau sesuai dengan potensi daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang perindustrian dan tenaga kerja, meliputi industry agro, industry non agro, tenaga kerja, pendalaman dan penguatan struktur industry, peningkatan daya asing, pengembangan iklim, usaha industry, standarisasi industry, teknoklogi industry, pengembangan industry strategis dan idustru hijau sesuai dengan potensi daerah;
- d. Pembinaan dan penyelnggaraan tugas di bidang perindustrian dan tenaga kerja meliputi penguatan struktur industry, peningkatan daya asing, pengembangan iklim usaha industry, standarisasi industry, teknoklogi

industry, pengembangan industry strategis dan idustru hijau sesuai dengan potensi daerah;

### **3 . Profil PT. Huadi Nickel di Kabupaten Bantaeng**

PT. Huadi Nickel Indonesia adalah perusahaan pengelolaan dan pemurnian nikel yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan didirikan sejak tahun 2014 sebagai Kerjasama investasi antara PT Duta Nickel Sulawesi dari Indonesai dan Shanghai Huadi, Co.Ltd dari China. Adapun tujuan produksi nikel ke negara tujuan yakni, Cina, India, Korea Selatan dan Jepang. Pengembangan industry diharapkan menjadi sumber pendapatan yang baru bagi masyarakat.

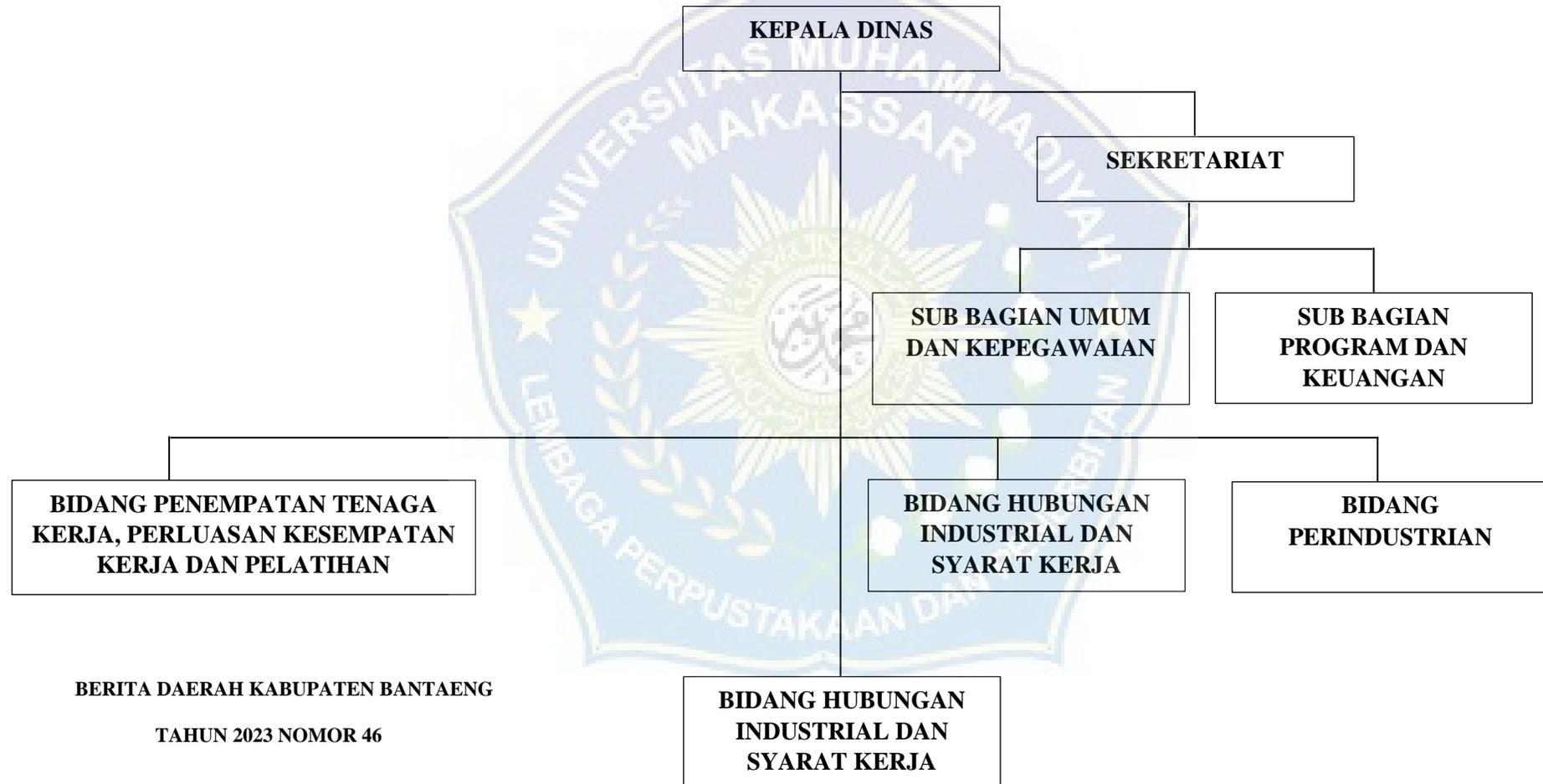
Untuk membangun pabrik dengan kapasitas tersebut PT Huadi Nickel Indonesia bekrja sama dengan PT PIN Persero dalam menyediakan daya, PT Huadi Nikel Indonesia, Kabupaten Bantaeng yang merupakan bagian dalam Kawasan industry Banateng serta dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten menjadi salah satu factor yang paling berperan dalam keberhasilan investasi dalam memperoleh fasilitas Kawasan berkat yang diberikan oleh kementrian keuangan melalui kanwil beacukai Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu dukungan dari pemerintah dalam rangka peningkatan nilai ekspor.

Pencapain dalam 5 tahun terakhir Kawasan Industry Bantaeng (KIBA) perusahaan smelter atau pabrik pemurnian nikel di indonesian membutuhkan perjuangan yang cukup Panjang. Sebagai mana Huadi Group, dapat memulai invenstasi di kabipaten bantaeng, Sulawesi selatan

Perjuangan Panjang Huadi Group terbayar Ketika mendapat persetujuan untuk beroperasi di akhir tahun 2018. Wajar jika berbagai kalangan memeberikan support terhadap Huadi Group hingga saat ini. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten, kecematn sampai desa. apa lagi dari perbangkan, TNI-polri meberikan dukungan penuh terhadap Huadi Group, bahkan tak sedikit mengakui kehadiran Huadi Group merubah wajah ekonomi masyarakat demikian juga daerahnya.



Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTAENG**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2023 NOMOR 46

## **B. Hasil Penelitian**

Wilayah pengembangan industry adalah pengelompokan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan kebelakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkaun pengaruh kegiatan pembangunan industry. Untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh, produktivas meningkat, dan pendapatan per kapita naik, diperlukan kebijakan industry agar terjadi perubahan structural dan peningkatan investasi.

Pembangunan Kawasan industry merupakan sarana untuk mengembangkan industry yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efensiensi, tata ruang, dan lingkungan. Kawasan industry adalah tempat pemusatan kegiatan industry pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan Kelola oleh perusahaan Kawasan industry.

Pengembangan kawasan industri Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri, dimana setiap perusaan industri baru setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, wajib masuk dalam kawasan industri. Dasar pertimbangan mewajibkan industri baru masuk dalam kawasan industri agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, akrab lingkungan, pengelolaan yang efektif

dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur yang diperlukan.

Kabupaten bantaeng menjadi salah satu kabupaten yang maju di Sulawesi Selatan. Pembangunan Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) menjadi industri strategis di Bantaeng yang cukup menjajjikan dalam memberikan efek secara ekonomi bagi Bantaeng. Disisi lain, pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bantaeng yang berbasis *Bantaeng Industrial Park* (BIP) masih terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu masih lemahnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengangkutan impor hasil industri di Kabupaten Bantaeng serta masih minimnya masyarakat lokal yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dalam kerjasama pengolahan hasil industri yang ada meskipun banyak perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam pengolahan industri ini, yang seharusnya adanya *Bantaeng Industrial Park* (BIP) ini dapat bermanfaat sebagai sumber pendapatan daerah penyedia lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Konsep pengambangan Wilayah Nasional Indonesia, mempunyai tujuan-tujuan: (1) mewujudkan keseimbangan antara daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya, (2) memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, dan (3) memelihara efisiensi pertumbuhan nasional. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan. Menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan

implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

PT. Huadi Nickel Indonesia adalah perusahaan pengelolaan dan permurnian nikel yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang di dirikan sejak tahun 2014 sebagai kerja sama investasi antara PT. Duta Nickel Sulawesi dari Indonesia dan Sanghai Huadi, Co.Ltd dari Cina. Adapun tujuan produksi nikel ke negara tujuan yakni, Cina, India, Korea Selatan dan Jepang. Pengembangan industry di harapkan menjadi sumber pendapatan yang baru bagi masyarakat.

Untuk membangun pabrik dengan kapasitas tersebut, PT. Huadi nikel Indonesia bekerjasama dengan PT. PIN Persero dalam menyediakan daya, PT. Huadi nikel Indonesia, Kabupaten Bantaeng, yang merupakan bagian dalam Kawasan industry Bantaeng serta dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten menjadi salah satu factor yang berperan dalam keberhasilan investasi dalam memperoleh fasilitas Kawasan berkat yang diberikan oleh kementerian keuangan melalui tanwil beacukai Sulawesi selatan yang menjadi salah satu dukungan dari pemerintah dalam rangka peningkat nilai ekspor.

Implementasi kebijakan adalah penerapan rangkaian sebuah konsep dan asas yang menjadi pedoman ataupun dasar rencana dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan dari apa yang menjadi aturan pemerintah dan diterapkan oleh seorang administrator atau pelaksana

aturan yaitu masyarakat atau yang menyangkut dalam aturan tersebut. Terkait dengan implementasi pengembangan Kawasan industri yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik diantaranya menurut Edward III terdapat empat faktor yaitu: a) komunikasi (*communication*), b) sumber daya (*resources*), c) disposisi (*Disposition*), yaitu kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implentor*) untuk melaksanakan kebijakan dan d) struktur birokratis (*bureauratic structure*) (Joko Widodo, h dalam Dikson Silitonga, 2022:53).

**a) Komunikasi**

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk pada tipe komunikasi vertikal.

Adapaun hasil wawancara oleh Bapak LK selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng, yaitu sebagai berikut:

“arah pembangunan perindustrian itu sekarang melalui pembangunan Kawasan industri seluruh kabupaten/kota itu sudah ada undang-undangnya tentang Kawasan industri, seluruh pembangunan industri itu mealui Kawasan industri dan melaui sentra-sentra industri di Bantaeng ada dua macam, pertama melalui Kawasan industri, kedua melalui sentra-sentra industri khusus Kawasan industri itu sesuai RT/RW kita sudah rencanakan untuk pembanangunan kawasan industri ada di kecamatan Pa’jukukang dan kecamatan Gantarangeke jadi

seluruh, Ketika industrinya sudah berjalan maka seluruh industry yang mau masuk ke Bantaeng itu harus membangunnya di Kawasan industry tapi sekarang jalannya belum semulus searah sana. Kalau pendapat saya memang lebih baik di arahkan ke Kawasan industry karena untuk control lingkungan control pengadaan izin control yang lain-lainnya itu akan lebih gampang dan untuk memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kontrol untuk pengawasan tapi kalau tidak tersebar akan sulit di kontrol sulit di manajemennya dan lain-lain, makanya arahnya terkhusus kebijakan pusat pun sampai ke daerah setelah pembangunan industry.”

Berdasarkan uraian narasumber diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa: pembangunan Kawasan industry melalui sentra-sentra industry di Kabupaten Bantaeng serta pembangunan industry juga melalui sentra-sentra Kawasan industry itu melalui TR/RW, serta pembangunan Kawasan industry juga ada di kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Gantarangkeke.

Lanjut wawancara dengan Bapak LK selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng, yaitu sebagai berikut:

“Kawasan industry itu di Kelola oleh perusahaan Kawasan industry tentunya struktur organisasinya adalah struktur organisasi perusahaan dimana perusahaan Kawasan industry itu berbeda dengan struktur organisasinya dengan perusahaan industry untuk yang ada sekarang. Kawasan industry itu PT. Bantaeng sikma Bantaeng sinergi cemerlang untuk detailnya saya belum lihat betul apa bagaimana struktur organisasinya tetapi ada poin-poin tertentu yang minimum harus ada di struktur organisasi sebuah Kawasan industry itu ada di atur 1142 tentang Kawasan industri”

Berdasarkan uraian narasumber di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa: Kawasan industry di Kelola oleh perusahaan yang tentunya memiliki struktur organisasi yang telah di atur dengan baik. Adapun setiap perusahaan industry itu memiliki struktur organisasi di

setiap perusahaan. Struktur organisasi ini sangat penting bagi sebuah perusahaan Kawasan industry.

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: pembangunan Kawasan industry melalui sentra-sentra industry di Kabupaten Bantaeng serta pembangunan industry juga melalui sentra-sentra Kawasan industry itu melalui TR/RW, serta pembangunan Kawasan industry juga ada di kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Gantarangeke. Kawasan industry di Kelola oleh perusahaan yang tentunya memiliki struktur organisasi yang telah di atur dengan baik. Adapun setiap perusahaan industry itu memiliki struktur organisasi di setiap perusahaan. Struktur organisasi ini sangat penting bagi sebuah perusahaan Kawasan industry.

#### **b) Sumber Daya**

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup jumlah staf yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dengan fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang di pandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga di katakana bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Adapun hasil wawancara oleh Bapak A selaku pengelola Kawasan industri Bantaeng Industrial Park, yaitu sebagai berikut:

“Kalau sampai sekarang memenuhi perincian dasar untuk di perusahaan industry itu belum bisa di penuhi 100% maka saran dari saya adalah kepenuhan Pendidikan dasar untuk perusahaan Kawasan industry yang ada baru nanti diteliti kelengkapan di dalam Kawasan industry baru di kembangkan tapi proses dasar yang harus dimiliki adalah izin dasar sebuah Kawasan industry itu harus di miliki sekarang dalam proses belum bisa di penuhi sementara berjalan dan belum bisa dipenuhi sampul sekarang jadi prosesnya masih berproses. Saran saya yaitu izin dasarnya dulu di penuhi baru nanti pembangunan ke dalam Kawasan industrinya pakah itu fasilitas jalan atau fasilitas pergudangan dan lain-lain”

Berdasarkan uraian narasumber diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa: Perizinan Bantaeng Industrial Park ini belum sepeuhnya berjalan dengan baik, dengan kata lain belum 100% memenuhi izin. Bagian pengelola Kawasan industry Bantaeng Industrial Park ini memberikan saran berupa pemenuhan Pendidikan dasar untuk Kawasan perusahaan ini. Untuk izin Kawasan industry ini masih dalam tahap proses pengurusan, dan apabila izin Kawasan ini sudah terpenuhi dengan baik maka Kawasan industry ini akan berjalan dengan baik pula.

Lanjut wawancara dengan Bapak A selaku pengelola Kawasan industry Bantaeng Industrial Park, yaitu sebagai berikut:

“pertama, sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan industry-industri yang ada di peruntukkan industri itu belum memenuhi secara kapasitas atau secara kualitas makanya tidak menutup kemungkinan secara kapasitas atau kuantitas akan mengambil tenaga kerja dari luar tetapi secara kualitas pemerintah sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat, kementerian tenaga kerja dengan membentuk BLK dan kementerian perindustrian

dengan membangun akademi komunikasi manufaktur yang ada di Tanetea. Kedua, yaitu usaha dari kementerian ini baik dari kementerian perindustrian mensupport pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM untuk pemenuhan tenaga kerja yang ada di Kawasan industry, terserah nanti perusahaan perusahaan maunya apa dua satuan kerja ini siap melaksanakan pelatihan keahlian sesuai permintaan perusahaan-perusahaan tersebut misalkan ada perusahaan yang butuh operator, dumtruk, eksapator, dan masyarakat disini belum ada itu bisa di fasilitasi sebenarnya melalui BLK mauoun akademi komunitas.”

Berdasarkan uraian narasumber diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa: SDM di Kabupaten Bantaeng masih kurang, maka dari itu pemerintah Kabupaten Bantaeng mengusulkan ke BLK untuk membuka pelatihan tenaga kerja untuk memonitoring pusat kementerian tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat local Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga meminta agar BLK menyiapkan pelatihan keahlian seperti operatir dumtruk, dan eksapator.

**c) Sikap (disposisi)**

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Metter and Horn disposisi yang diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Kemauan menentukan Tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak D selaku Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“menurut saya, dengan adanya Kawasan industry yang dibangun di daerah kami ini mengalami beberapa dampak, seperti perubahan suhu menjadi lebih panas dari sebelumnya dan juga berdampak pada kekeringan sumur jadi kami agak sulit untuk mendapatkan air bersih”

Berdasarkan uraian narasumber diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa: Dengan adanya Kawasan industry yang dibangun di daerah Bantaeng ini mengala dampak kekeringan sumur serta perubahan suhu yang menjadi lebih panas dari sebelumnya. Kekeringan sumur mengakibatkan sulitnya Masyarakat memperoleh air bersih.

Lanjut, wawancara dengan Ibu D selaku Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Kawasan industry ini lebih mengutamakan Masyarakat dari luar daerah di bandingkan dengan Masyarakat local Bantaeng. Harapan saya dengan Kawasan industry ini bisa lebih mengutamakan Masyarakat local dari daerah luar, karena masih banyak orang lokal yang belum punya pekerjaan tetap”

Berdasarkan uraian narasumber diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Kawasan industry ini lebih mengutamakan pekerja dari luar di bandingkan Masyarakat local Bantaeng sehingga mengakibatkan masih banyak Masyarakat lokal Bantaeng yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

#### **d) Struktur Birokrasi**

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif

karena tidak efisien struktur birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak B selaku Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“menurut saya struktur organisasi di Kawasan tambang ini belum efektif karena masih banyak keluhan-keluhan warga di sini yang tidak di penuhi oleh pengelola tambang, dan masih juga orang-orang disini yang tidak punya pekerjaan.”

Berdasarkan uraian narasumber diatas, maka menulis menyimpulkan bahwa: Stuktur organisasi di Kawasan industri ini belum berjalan dengan efektif masih ada aspirasi Masyarakat setempat yang belum terealisasikan oleh pihak pengelola Kawasan industri, seperti lowongan pekerjaan untuk Masyarakat setempat.

Lanjut, wawancara dengan Bapak B selaku Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“saya berharap dan masyarakat disini juga berharap pihak tambang bisa mempekerjakan Masyarakat lokal yang masih menganggur dan juga bisa mendengarkan keluhan-keluhan warga sekitar tambang ini.”

Berdasarkan uraian narasumber diatas, maka menulis menyimpulkan bahwa: Sangat besar harapan Masyarakat kepada pihak pengelola industri untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Bantaeng, dapat dilihat dari hasil wawancara Bersama narasumber diatas bahwa masih banyak warga lokal yang belum memiliki

pekerjaan tetap dan Masyarakat setempat juga berharap ada pihak Kawasan industri bisa mendengar keluhan Masyarakat.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan diatas, dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri (Bantaeng Industrial Park) Di Kabupaten Bantaeng ini telah berjalan. Implementasi Kebijakan ini telah selaras dengan indikator implementasi yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Sikap (disposisi), 4) struktur birokrasi. Selengkapnya adalah sebagai berikut.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk pada tipe komunikasi vertikal. Komunikasi kebijakan adalah “interaksi komunikasi yang saling mempengaruhi antara pembuat kebijakan, kelompok penekan, dan Masyarakat umum dalam menentukan kebijakan publik. Peran strategi komunikasi dalam Kebijakan Pemerintah di Era Digital. Setiap kebijakan publik perlu dikomunikasikan dengan baik kepada Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan public tersampaikan dan dipahami Masyarakat secara utuh. Komunikasi sangar diperlukan

sebab hal ini memiliki beberapa alasan, yakni agar para pelaksana kebijakan Pendidikan serta khalayak umum secara mendalam dan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

## 2. Sumber Daya

Sebelum implementasi dimulai, setiap orang harus memahami dengan jelas tujuan kebijakan tersebut. Identifikasi sumber daya dapat membantu anda menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini dapat mencakup pendanaan, staf, dan infrastruktur yang diperlukan. Tentukan siapa yang terlibat dan siapa yang melakukan apa selama implementasi.

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup jumlah staf yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dengan fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang di pandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga di katakana bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

## 3. Sikap (Disposisi)

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Metter and Horn disposisi yang diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk

melaksanakan kebijakan. Kemauan menentukan Tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau kebijakan, khususnya para pelaksana yang menjadi implementator dari program. Keberadaan aparat pelaksana memiliki peranan yang besar dan menentukan keberhasilan atau kebijakan dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

#### 4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif karena tidak efisien struktur birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Tugas utama birokrat adalah melaksanakan kebijakan pemerintah, mengambil undang-undang dan keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan melaksanakannya. Beberapa birokrat juga menulis peraturan dan ketentuan untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah, sementara ada juga yang secara langsung menjalankan kebijakan kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Industri (Bantang Industrial Park) di Kabupaten Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng menerapkan kebijakan kawasan industri (Bantaeng Industrial Park). Adapun bentuk implementasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng yaitu membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal Kabupaten Bantaeng. Adapun proses dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Industri adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi bertujuan untuk menciptakan kesepahaman dan penyampaian pesan dan juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik, individual, dalam kelompok ataupun organisasi.
2. Sumber daya bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.
3. Sikap bertujuan untuk mekanisme dalam pertahanan ego dalam rangka melindungi dalam tantangan internal maupun eksternal. Sikap ini diambil bila orang yang bersangkutan dalam keadaan terancam baik dirinya maupun egonya. Untuk mempertahankan egonya orang tersebut akan mengambil sikap tertentu.

4. Struktur birokrasi bertujuan untuk menjalankan program tertentu untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh aspek masyarakat dan melakukan pembangunan secara merata. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maupun perlindungan hak.

## **B. Saran**

Berdasarkan saran yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran terkait Implementasi Kebijakan Kawasan Industri (Bantang Industrial Park) di Kabupaten Bantaeng, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng agar lebih mengutamakan untuk mempekerjakan masyarakat lokal yang ada Kabupaten Bantaeng, utamanya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat mendengar dan mempertimbangkan keluhan-keluhan dari masyarakat setempat, utamanya yang berada di kawasan industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbiani, Ere Mardella., Azhar., Mahdun. 2019. *Implementasi Kebijakan penataan berdasarkan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif, Vol. 3 No. 2, 104-115.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.
- Ama, Dinda Asmaradhana. 2021. *Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penata Laksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Andyani, Febi Dwi. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 dan 2018)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Abdul Wahab, Solichin. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Antika, Mala. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Industri Kecil dan Menengah di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- B, Rahmi. 2018. *Implementasi Kurikulum 2017 (Studi Pada 3 Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Enrekang)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Dewi, Dhea Candra., Dkk. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Darmayanti. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Desa Makoro Kabupaten Wakatobi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Eko Putra, Aditya. 2018. *Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota*. Skripsi: Universitas Brawijaya.
- Firdaus, Idos. 2019. *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang*. Skripsi. Universitas Sultan Agung Trisatya.
- Fattah, Mochammad., Purwanti, Pudji. 2017. *Manajemen Industri Perikanan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Homer, Eliezer Nelson. 2016. *Penentuan Jenis Klaster Industri di Kawasan Industri Arar Kabupaten Sorong Berdasarkan Metode Delphi dan*

- Analytical Hierarchi Procces (AHP)*. Indonesian Green Technology Journal, E-ISSN 2358-1787.
- Hatta. 2018. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kementerian Perindustrian. 2015. *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*. Jakarta: Pusat Komunikasi Publik.
- Mattata, Shinta Noviana. 2015. *Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Lorasita) di Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Mustari, Nuryati. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Noer, Justiar., Effendy, Khasan., Ngadisah., Lukman, Sampara. 2019. *Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Papatung, Vol.2 No.3.
- Oetomo, Dedy., Permatahati, Intan Yustika. 2021. *Kawasan Industri Perikanan dan Kelautan Terpadu Konawe Kepulauan*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Phuk Tjilen, Alexander. 2019. *Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. Bandung: Nusa Media.
- Silalahi, Jur Udin. 2009. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Silitong, Dikson. 2022. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Purwokerto: Zahira Media Publisher.
- Sayekti, Nidya Waras., Mauleny, Ariesty Tri., Lisnawati, Izzati. 2022. *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Triananda, Alfa Reza. 2022. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Dalam Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Taufiqurrokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopu Beragama (Press).
- The King Eduka. 2018. *Modul Ringkasan SBMPTN Geografi*. Jakarta: C Media.

Wati, Lina. 2013. *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional*. Skripsi. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Bantaeng



Gambar 2. Permohonan izin penelitian di Dinas Tenaga Kerja  
dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kabupaten Bantaeng



Gambar 4. Dokumentasi Lokasi Tambang PT. Huadi Nickel Alloy



Gambar 5. Dokumentasi Pengambilan data di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng



Gambar 6. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat setempat





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1902/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

23 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1065/FSP/A.6-VIII/VII/1444 H/2023 M tanggal 4 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NADIA

No. Stambuk : 10561 1123517

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (BANTAENG INDUSTRI PARK) DI KABUPATEN BANTAENG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Juli 2023 s/d 14 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : J. Kartir No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaeng@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 500.16.7/206/IPL/DPM-PTSP/VI/III/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: NADIA
Jenis Kelamin	: Perempuan
N.I.M	: 105611123517
No. KTP	: 7310034805990003
Program Studi	
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Pulau Pajene kang Kec. Lukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :  
"Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri ( Bantaeng Industrial Park) di Kabupaten Bantaeng "

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 17 Juli 2023 s.d. 17 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
  2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang dibenarkan;
  3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
  4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
  5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian surat keterangan ini dibenarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 08 Agustus 2023

a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1202319009000220



**YOHANIS.PHR ROMUTI, S.I.P**  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jl. A. MANNAPPIANG No. 05 Bantaeng Telp. (0413) 21202 Fax (0413) 22091

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 500.2.3/528/D.Naker&Ind/IX/2023

Berdasarkan surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng Nomor: 500.16.7/206/IPL/DPM-PTSP/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Izin Penelitian, atas nama :

Nama : NADIA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
N I M : 105611123517  
No. KTP : 7310034805990003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar  
Alamat : Pulau Pajeneang Kec. Lukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Telah Melakukan Penelitian mulai tanggal 17 Juli s.d 17 September 2023 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 18 September 2023



**IRYAND LANGGARA, AP**  
Pangkal Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740619 199412 1 001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nadia  
Nim : 105611123517  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

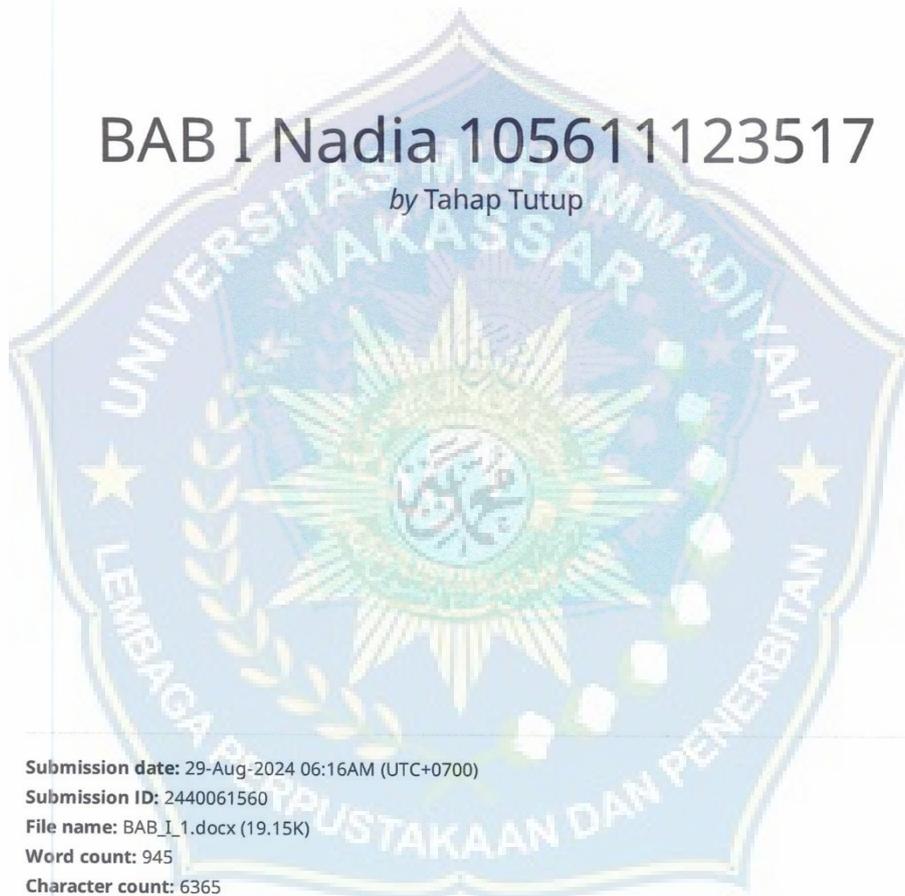
Makassar, 29 Agustus 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



# BAB I Nadia 105611123517

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 29-Aug-2024 06:16AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440061560

**File name:** BAB\_I\_1.docx (19.15K)

**Word count:** 945

**Character count:** 6365

BAB I Nadia 105611123517

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

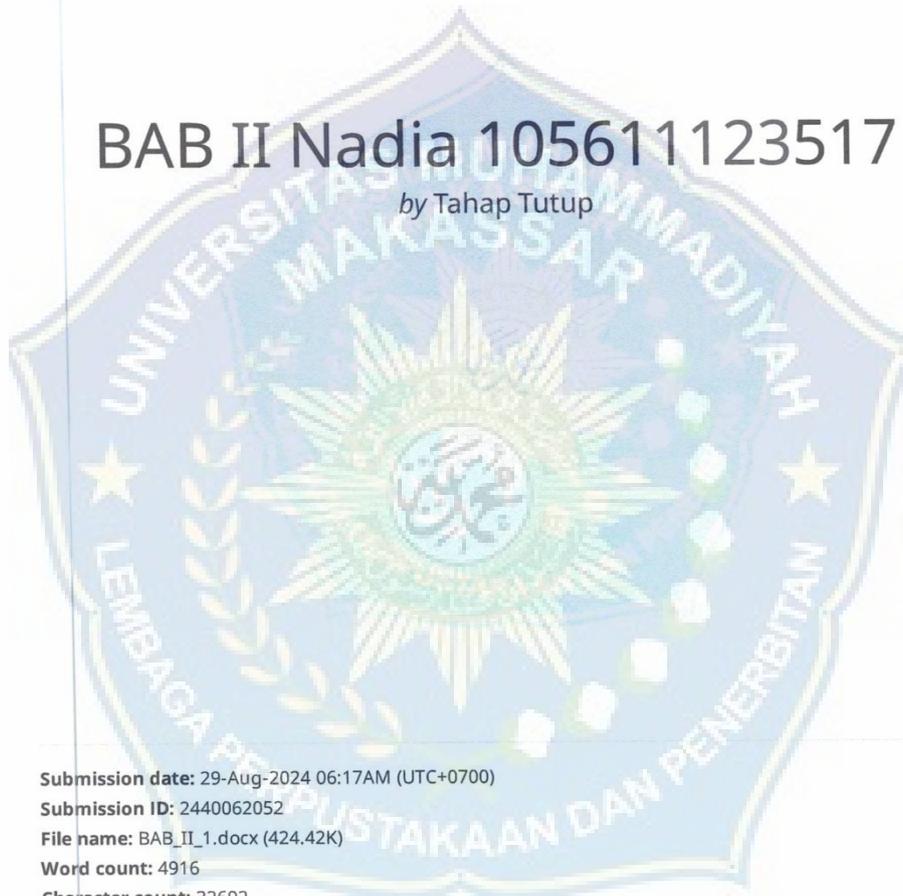
Exclude quotes  Off      Exclude matches  2%

Exclude bibliography  Off



# BAB II Nadia 105611123517

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 29-Aug-2024 06:17AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440062052

**File name:** BAB\_II\_1.docx (424.42K)

**Word count:** 4916

**Character count:** 32692

BAB II Nadia 105611123517

ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

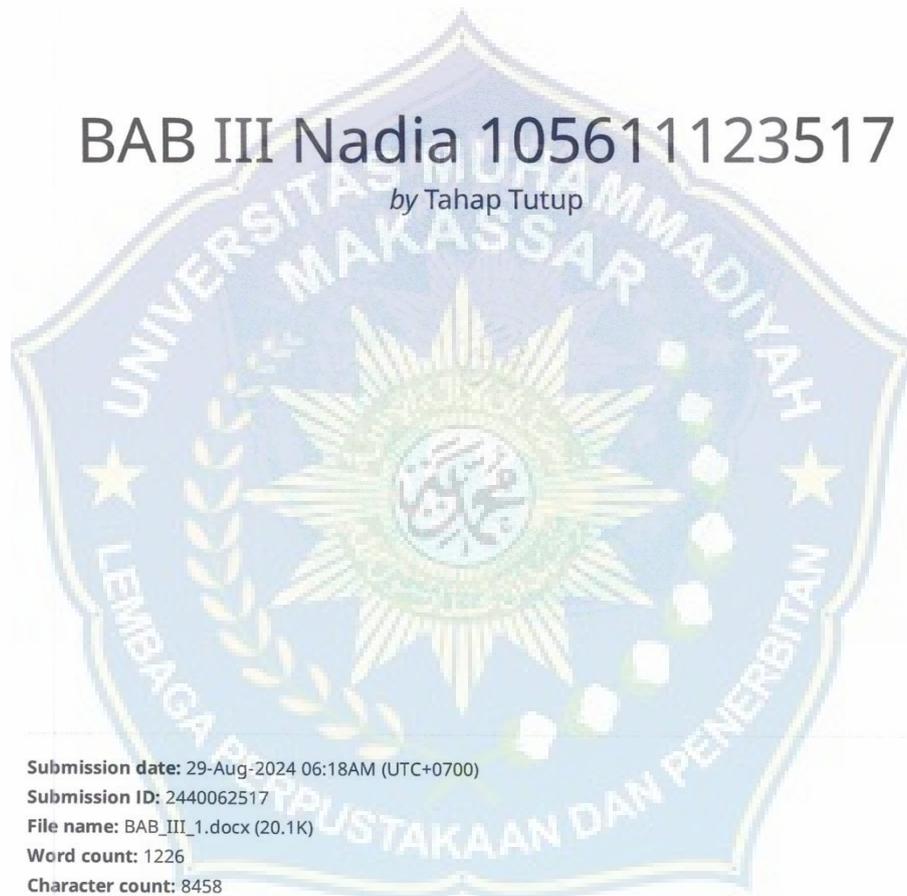
<b>1</b>	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  Off



# BAB III Nadia 105611123517

by Tahap Tutup



**Submission date:** 29-Aug-2024 06:18AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440062517

**File name:** BAB\_III\_1.docx (20.1K)

**Word count:** 1226

**Character count:** 8458

### BAB III Nadia 105611123517

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

4%

2

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

4%



Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 3%

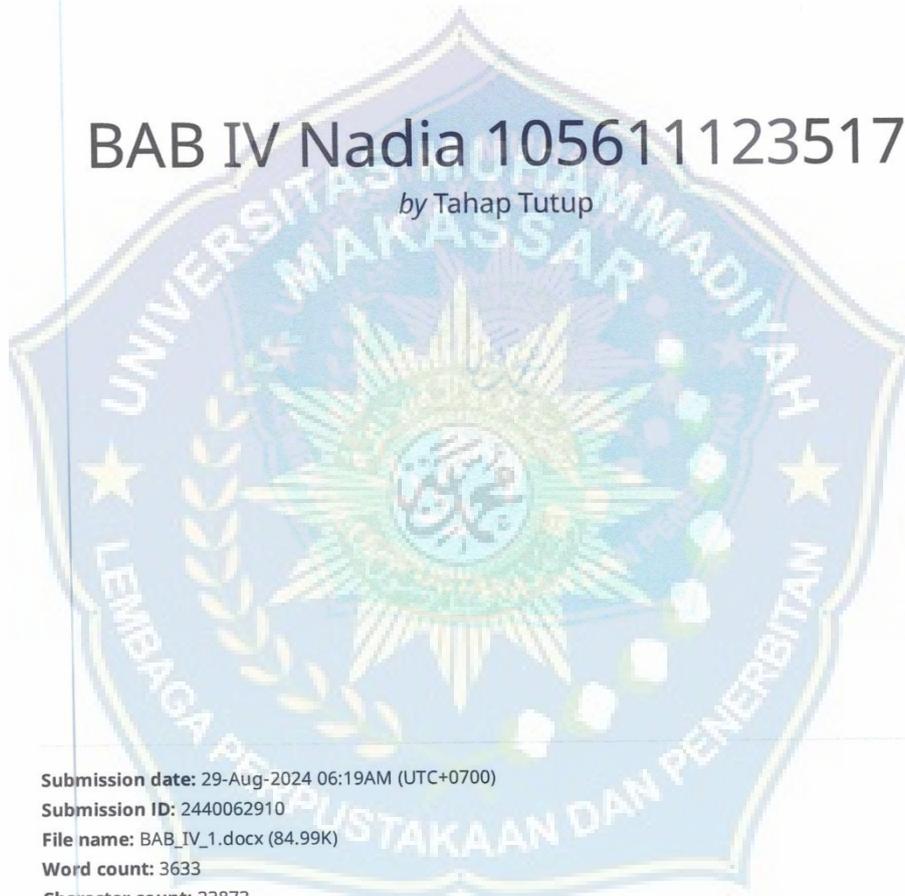
Exclude bibliography

Off



# BAB IV Nadia 105611123517

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 29-Aug-2024 06:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440062910

**File name:** BAB\_IV\_1.docx (84.99K)

**Word count:** 3633

**Character count:** 23873

### BAB IV Nadia 105611123517

ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b> SIMILARITY INDEX	<b>3%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
----------	--------------------------------------	-----------

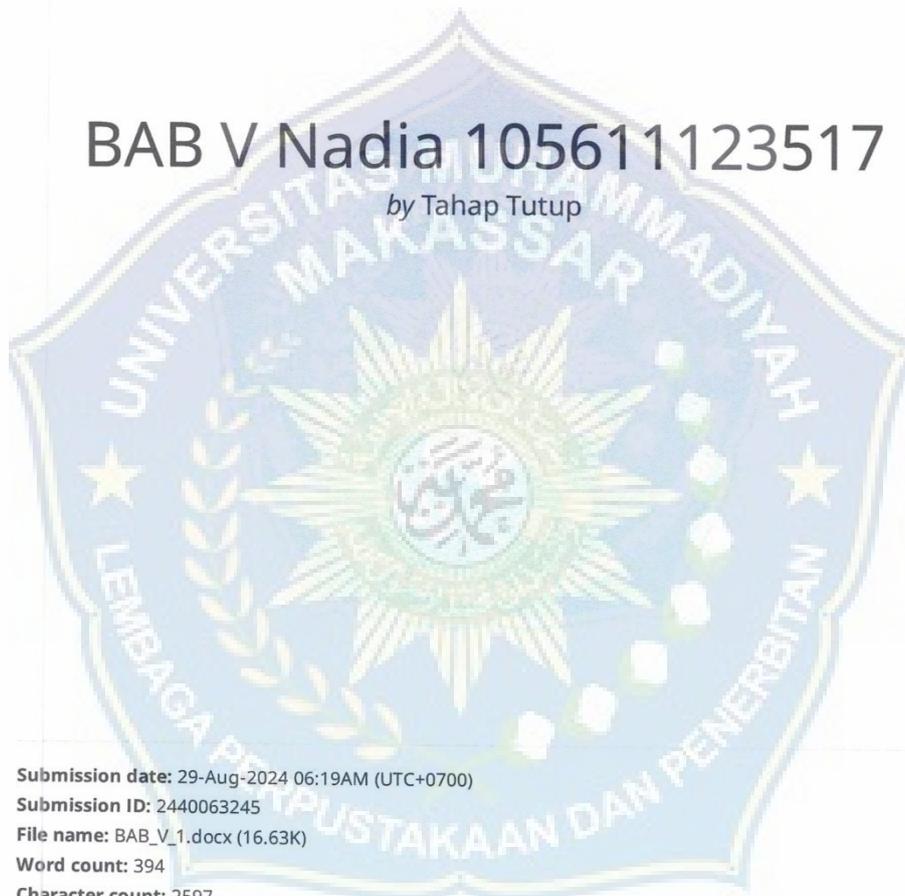


Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  Off



# BAB V Nadia 105611123517

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 29-Aug-2024 06:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440063245

**File name:** BAB\_V\_1.docx (16.63K)

**Word count:** 394

**Character count:** 2597

BAB V Nadia 105611123517

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NADIA Lahir di pulau pa'jenekang, pada tanggal 8 Mei 1999. Anak ke dua dari tiga bersaudara, buah hati pasangan dari Ayahanda Supriadi dan Ibunda Muriana. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di sekolah Dasar (SD) di SD NEGERI 16 PULAU PA'JENEKANG pada tahun 2005 dan selesai Pada Tahun 2011, Pada Tahun 2011 penulis melanjutkan di sekolah Menengah pertama (SMP) di SMP NEGERI 3 SATAP yang selesai Pada Tahun 2014, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) di MA.MA'ARIF LASEPANG dan tamat Pada Tahun 2017, pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara hingga selesai di tahun 2024.

